Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 3, No. 1, April 2020

PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI REGULATOR, DINAMISATOR, FASILITATOR, DAN KATALISATOR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DI KABUPATEN LUWU UTARA

Riska Firdaus

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma, Palopo
Email : riska269@gmail.com

Abstrak

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksankan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunaka adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menganalisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara ada dalam kategori cukup baik, dimana dalam indikator regulator, mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao, meningkatkan produktivitas petani, mengatasi masalah petani kakao, dan meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dengan presentase rata-rata 64,99%. Peran pemerintah sebagai Dinamisator berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani kakao, meningkatkan inovasi dan pemanfaat teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, dan sebagai agen mempercepat perubahan, dapat dikatakan baik dengan presentase rata-rata 62,83%. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis, dapat dikatakan cukup baik, dengan presentase rata-rata 52,69%. Peran pemerintah sebagai Katalisator, merespon berbagai keluhan petani kakao, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus lebih ditingkatkan dan pemasaran hasil pertanian harus dipermudah agar petani kakao dapat menjual hasil pertaniannya. Peran pemerintah sebagai katalisator di Kecamatan Sabbang dikatakan cukup baik dengan jumlah presentase rata-rata 52,89%.

Kata Kunci :, *Peran Pemerintah, Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Katalisator*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pemberdayan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh dan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Sulistiyani, dkk. 2003).

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas (Jusnaeni, 2017).

Pembangunan nasional telah menjadi komitmen pemerintah dalam mencapai peningkatan pembangunan pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional menuju swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, menyumbang produk domestik bruto, sumber devisa, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor pertanian lainnya.

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan menggantungkan hasil pertanian sebagai sumber terbesar dari pendapatan daerah. Kondisi wilayah Sulawesi Selatan sebagian besar yang berpotensi adalah bidang pertanian, sebagian besar pendapatan masyarakat berasal dari produk pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan dan kehutanan. Permasalahan yang ada terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya

keuangan, sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sentral pengembangan dan penghasil kakao terbesar di Sulawesi Selatan. Hampir di setiap wilayah Kabupaten Luwu Utara terdapat tanaman kakao, tanaman kakao ini terbilang sangat mudah tumbuh dengan kondisi iklim yang cocok untuk tanaman kakao mulai dari pegunungan hingga wilayah daratan. Masyarakat petani di Kabupaten Luwu Utara mayoritas menggantungkan hidupnya pada tanaman kakao. Pada umumnya mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi pertaniannya tetapi karena banyaknya masalah yang dihadapi sehingga sulit mencapai apa yang diinginkan. Masalah kurangnya pemahaman petani terhadap pengembangan lahan pertanian menyebabkan semakin menjalarnya kemiskinan pada petani golongan kecil.

Petani dalam kegiatan usaha taninya sudah banyak menggunakan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan produksi, petani juga dituntut untuk meningkatkan kualitas biji kakao yang dihasilkan dari usaha taninya agar dapat bersaing dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui penanganan yang tepat dalam pembudidayaan tanaman kakao yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan petani itu sendiri.

Peran Pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharunya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai tarap hidup yang lebih berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kakao di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pemberdayaan petani yang belum memuaskan, pencapaian tujuan pemerintah diharapkan mampu mengangkat tingkat kesejahteraan petani.

Peranan pemerintah daerah dalam memberdayaakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1) Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
2) Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah)
3) Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).
4) Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi (Arif dalam Nurdin, 2014).

Keberhasilan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan dana, ketersediaan aparat teknis dan non-teknis, serta sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut lebih banyak menyangkut lemahnya koordinasi dan pemahaman yang berbeda pada berbagai tingkat, ancaman iklim, alih fungsi lahan, terbatasanya sumberdaya aparatur, terbatasnya infrastruktur pertanian, masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dan aparat pertanian dalam penggunaan teknologi dan belum optimalnya kelembagaan petani yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti serta mengintegrasikan data yang ada secara objektif. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka akan digunakan metode survei terhadap responden untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. Adapun populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan petani kakao yang aktif dalam program pemerintah terkait dengan perkebunan kakao yang ada di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sebanyak 323 petani kakao. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Random Sampling dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2014). Dengan teknik penarikan sampel slovin dengan tingkat toleransi 10 %, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 responden.

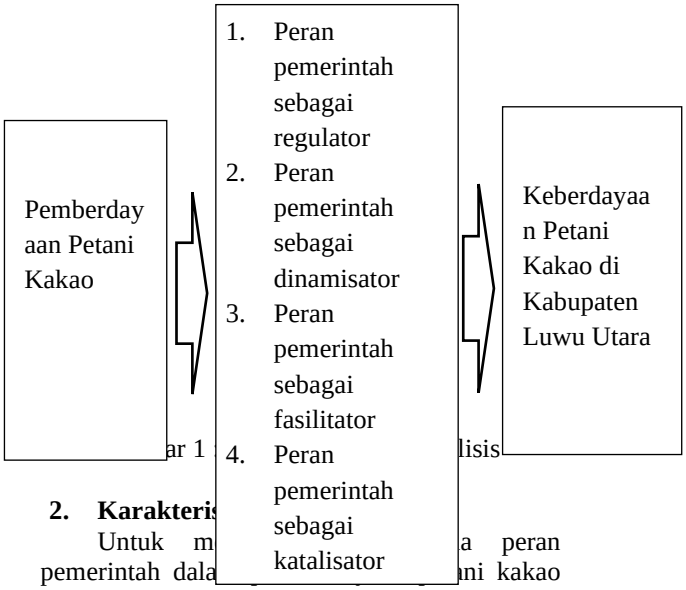
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Instrument yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah kuesioner yang dibuat berdasarkan skala likert.

HASIL PENELITIAN

1. Model Kerangka Analisis

Paradigma pembangunan perkebunan untuk masyarakat adalah membangun masyarakat perkebunan melalui usaha pokok komoditas tanaman perkebunan. Sasaran akhir pembangunan usaha tani kakao adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani. Pengembangan kelembagaan petani harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani. Tahapan yang harus dilakukan untuk lebih mengarahkan pentinganya kelembagaan tersebut antara lain dengan membuat perencanaan kerja sama organisasi yang matang serta menyesuaiakan dengan kebutuhan dan kelembagaan kelompok, seperti dari segi sumber daya manusia, organisasi, keuangan, dan kemitraan usaha. Keterlibatan pemerintah dalam pembinaan kelembagaan usaha perkebunan kakao harus dilakukan setiap saat sepanjang waktu, sesuai dengan pengembangan dunia usaha yang juga selalu berubah setiap saat. Kemandirian usaha para perkebun harus bisa diwujudkan melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan usahanya.

Guna menjadikan program pemberdayaan petani dapat tersusun sesuai dengan yang diinginkan oleh para pemerintah dan petani, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai, maka dapat dikukur dengan melihat peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator yang dikemukakan oleh Arif (dalam Nurdin, 2014). Model kerangka analisisnya dapat dilihat dari gambar berikut.



ar 1 lisis

2. Karakteris

Untuk m a peran pemerintah dala ni kakao di Kabupaten Luwu Utara, penulis menganalisis hasil kuesioner berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan dari responden. Pengelompokan data sampel ini diperlukan untuk melihat gambaran dari peran pemerintah yang dirasakan oleh para petani.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	69	87,34%
2	Perempuan	7	9,21%
Total		76	100%

Sumber: data primer, Februari 2020

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 76 responden, terdapat 69 orang atau 87,34% yang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang atau 9,21% yang berjenis kelamin perempuan, hal ini menunjukan bahwa petani kakao yang ada di Kecamatan Sabbang lebih dominan berjenis kelamin laki-laki.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	23-39	19	25%
2.	40-59	47	61,84%
3.	62-76	10	13,16%
Total		76	100%

Sumber: data primer, Ferbuari 2020

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 76 orang responden, mereka yang berumur 23-39 tahun sebanyak 19 orang atau 25%, 40-59 tahun sebanyak 47 orang responden atau persentase 61,84%, dan 10 orang atau 13,16% responden berumur sekitar 62-76 tahun.

Berdasarkan data tersebut perlu diketahui bahwa umur dapat mempengaruhi tingkat kedewasaan seseorang dalam menilai sesuatu sehingga sangat mempengaruhi perilaku dan cara berpikirnya.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	33	43,42%
2.	SMP	21	27,63%
3.	SMA	19	25%
4.	S1	3	3,94%
Total		76	100%

Sumber: data primer, Februari 2020

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari 76 responden terdapat 33 atau 43,42% responden yang berpendidikan SD, sedangkan yang berpendidikan SMP yaitu 21 atau 27,63% responden, yang berpendidikan SMA yaitu 19 atau 25% responden dan yang berpendidikan S1 yaitu 3 atau 3,94% responden. Pada saat peneliti melakukan penelitian jumlah tingkat pendidikan petani kakao paling banyak yaitu tingkat pendidikan SD.

3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kakao

Untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arif (dalam Nurdin, 2014), yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Adapun pernyataan-pernyataan dalam mengukur peran pemerintah sebagai regulator, adalah:

- Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal pemberdayaan petani
- Kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao
- Peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani kakao
- Peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah petani kakao
- Peran pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao

Tabel 4 : Tanggapan Responden tentang Peran Pemerintah sebagai Regulator

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase (%)
		SB	B	CB	TB		
1	Peran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam hal pemberdayaan petani kakao	11	49	9	7	2,84	71
2	Peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao	9	50	11	6	2,82	70,4
3	Peran pemerintah dalam meningkatkan produktifitas petani kakao	7	46	14	9	2,67	66,78
4	Peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah petani kakao	2	20	36	18	2,08	51,97
5	Peran pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pertanian kakao	6	42	19	9	2,6	64,8
Total Rata-Rata						**2,6**	**64,99**

Sumber: data primer, Februari 2020

Dari tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah sebagai regulator dilihat dari pernyataan-pernyataan bahwa peran pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan terhadap pemberdayaan petani kakao dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 2,84 atau 71%, peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao kategori baik dengan nilai rata-rata 2,82 atau 70,4%, peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani kakao kategori baik dengan nilai rata-rata 2,67 atau 66,78%, peran pemerintah dalam mengatasi masalah petani kakao kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,08 atau 51,97%, dan Peran pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 2,6 atau 64,8%.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan petani dengan nilai rata-rata 2,6 atau 64,99% dikategorikan baik. Dimana dalam pembuatan kebijakan tentang pemberdayaan petani sudah ada hanya saja perlu dibuatkan aturan yang jelas terkait pemberdayaan petani agar para petani merasa diperhatikan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) yang mengatakan bahwa Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Selain itu, sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan petani kakao yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator (Penggerak)

Indikator ini mencakup Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah).

Adapun yang menjadi pernyataannya, adalah :

- Peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani kakao
- Peran pemerintah dalam meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi
- Peran pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengelolaan perkebunan kakao
- Peran pemerintah dalam meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisifatif
- Peran pemerintah sebagai agen mempercepat perubahan

Tabel 5: Tanggapan Responden tentang Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase (%)
		SB	B	CB	TB		
1	Peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani kakao	4	41	23	8	2,54	63,49
2	Peran pemerintah dalam meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi	2	11	57	6	2,12	52,96
3	Peran pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengelolaan perkebunan kakao	3	43	19	11	2,5	62,5
4	Peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan yang partisipatif	3	56	10	7	2,72	68,09
5	Peran pemerintah sebagai agen mempercepat perubahan	6	49	12	9	2,68	67,12
Total						2,51	62,83

Sumber: data primer, Februari 2020

Dari tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator dilihat dari pernyataan-pernyataan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani kakao dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 2,54 atau 63,49%, peran pemerintah dalam meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,12 atau 52,96%, peran pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengelolaan perkebunan kakao kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,5 atau 62,5%, peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan yang partisipatif kategori baik dengan nilai rata-rata 2,72 atau

68,09%, dan peran pemerintah sebagai agen mempercepat perubahan dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 2,68 atau 67,12%.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan petani dengan nilai rata-rata 2,51 atau 62,83% dikategorikan baik. Dimana sebagai penggerak, pemerintah sudah cukup aktif dalam meningkatkan kualitas dan kreatifitas para petani, hal itu dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, akan tetapi dalam pengelolaan dan meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi masih sangat kurang. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010) yang mengatakan bahwa Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator (Memfasilitasi)

Indikator ini mencakup Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan derah). Adapun yang menjadi pernyataan-pernyataannya adalah sebagai berikut:

- Peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana
- Peran pemerintah dalam memberikan modal kepada kelompok tani
- Peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani kakao
- Peran pemerintah dalam penyediaan penyuluhan dan pendampingan
- Peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis

Tabel 6: Tanggapan Responden tentang Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase (%)
		SB	B	CB	TB		
1	Peran pemerintah dalam menyediakan saran dan prasarana	0	24	45	7	2,22	55,59
2	Peran pemerintah dalam memberikan modal kepada kelompok tani	0	4	54	18	1,82	45,39
3	Peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan	2	13	55	6	2,14	53,62
4	Peran pemerintah dalam penyediaan penyuluhan dan pendampingan	0	13	57	6	2,09	52,3
5	Peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis	4	21	42	9	2,26	56,58
Total						2,12	52,69

Sumber: data primer, Februari 2020

Dari tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dilihat dari pernyataan-pernyataan bahwa Peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,22 atau 55,59%, Peran pemerintah dalam memberikan modal kepada kelompok tani kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 1,82 atau 45,39%, Peran pemerintah dalam penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok tani kakao kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,14 atau 53,62%, Peran pemerintah dalam penyediaan penyuluhan dan pendampingan kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,09 atau 52,3%, dan Peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,26 atau 56,58%.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai

fasilitator dalam pemberdayaan petani dengan nilai rata-rata 2,12 atau 52,69% dikategorikan cukup baik. Dimana sebagai fasilitator, pemerintah telah memfasilitasi para petani kakao dalam hal pendampingan, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi dengan adanya pemberian pelatihan dan keterampilan secara teknis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2010) bahwa Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasiitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

d. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bias menjadi model sosial untuk membangunan partisipasi. Adapun pernyataan-pernyataan dalam mengukur peran pemerintah sebagai katalisator, adalah:

- Peran pemerintah dalam merespon berbagai keluhan petani kakao
- Peran pemerintah dalam melakukan koordinasi multi pihak
- Kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani
- Kepuasan kelompok tani terhadap kinerja pendamping kelompok tani
- Peran pemerintah dalam mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil perkebunan kakao

Tabel 7 : Tanggapan Responden tentang Peran Pemerintah sebagai Katalisator

No	Pernyataan	Tanggapan Responden				Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase (%)
		SB	B	CB	TB		
1	Peran pemerintah dalam merespon berbagai keluhan petani kakao	0	14	57	5	2,12	52,96
2	Peran pemerintah dalam melakukan koordinasi multi pihak	0	20	47	9	2,14	53,62
3	Kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani	0	23	47	6	2,22	55,59
4	Kepuasan kelompok tani terhadap kinerja pendamping kelompok tani	0	24	48	4	2,26	56,58
5	Peran pemerintah dalam mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil perkebunan kakao	0	7	49	20	1.83	45,72
Total Rata-Rata						**2,11**	**52,89**

Sumber: data primer, Februari 2020

Dari tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah sebagai katalisator dilihat dari pernyataan-pernyataan bahwa Peran pemerintah dalam merespon berbagai keluhan petani kakao dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,12 atau 52,96%, Peran pemerintah dalam melakukan koordinasi multi pihak kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,14 atau 53,62%, Kemampuan penyuluh dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,22 atau 55,59%, Kepuasan kelompok tani terhadap kinerja pendamping kelompok tani kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 2,26 atau 56,58%, dan Peran pemerintah dalam mengembangkan sistem dan sarana pemasaran

hasil perkebunan kakao dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 1,83 atau 45,72%.

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai katalisator dalam pemberdayaan petani dengan nilai rata-rata 2,11 atau 52,89% dikategorikan cukup baik. Dimana pemerintah turun langsung ke lapangan dalam memperhatikan para petani, akan tetapi pendampingan yang dilakukan masih sangat kurang, apalagi dalam mengembangkan sistem pemasaran masih sangat kurang. Hal ini karena tidak adanya pelibatan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengelola pertanian, khususnya tentang hasil perkebunan kakao. Artinya adalah bahwa peranan baru bagi pemerintah hendaknya lebih diarahkan sebagai pengatur dan pengendali daripada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan pemberi layanan (steering rather than rowing). Secara implisit hal ini mengandung pemikiran bahwa pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tanggungjawab kepada swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakan urusannya, baik melalui privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama operasional, dan sebagainya. Dengan kata lain, pemerintah lebih banyak merangkul masyarakat dan swasta untuk bersama-sama memikul suatu tanggungjawab atau urusan (Murtir Jeddawi, 2008).

4. Rekapitulasi Indikator Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kakao

Berikut ini rekapitulasi total indikator peran pemerintah dalam pemerdayaan petani kakao :

Tabel 8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kakao

No.	Tanggapan Responden	Rata-Rata Nilai	Rata-Rata Persentase (%)	Kategori
1.	Peran pemerintah sebagai regulator	2,6	64,99	Baik
2.	Peran pemerintah sebagai dinamisator	2,51	62,83	Baik
3.	Peran pemerintah sebagai fasilitator	2,12	52,69	Cukup Baik
4.	Peran pemerintah sebagai katalisator	2,11	52,89	Cukup Baik
Rata-rata persentase		**2,34**	**58,35**	**Cukup Baik**

Sumber:Hasil Olahan Data Primer, Ferbuari 2020

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan petani kakao dengan menggunakan indikator peran pemerintah, masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dimana peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan petani kakao di Kecamatan Sabbang baik dengan rata-rata nilai **2,6** atau **64,99%,** peran pemerintah sebagai dinamisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kecamatan Sabbang baik dengan rata-rata nilai **2,51** atau **62,83%.** Selanjutnya peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan petani kakao di Kecamatan Sabbang cukup baik dengan rata-rata nilai **2,12** atau **52,69%** dan peran pemerintah sabagai katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kecamatan Sabbang cukup baik dengan rata-rata nilai **2,11** atau **52,89%.** Dari 4 indikator tersebut, skor paling tinggi yaitu indikator peran pemerintah sebagai regulator, dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu 2,6 atau **64,99%.**

Dari data di atas pihak pemerintah daerah (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Kabupaten Luwu Utara sebaiknya membuat kebijakan yang lebih jelas lagi terkait pemberdayaan petani kakao, Pihak pemerintah harus terjun langsung ke lapangan melihat langsung apa yang dibutuhkan oleh petani kakao dengan begitu bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dinginkan oleh para petani. Selain itu, Pihak penyuluh harus senantiasa berperan aktif pada upaya melakukan perubahan perilaku petani dalam mengembangankan potensi sumberdaya yang ada. Dan perlu adanya perbaikan materi (inovasi), metode dan teknik penyuluhan dalam program pemberdayaan perkebunan petani kakao disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Serta dibutuhkan sistem pemasaran yang baik dalam memperkenalkan produk-produk daerah khususnya dalam produksi tanaman kakao.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara berdasarkan empat indikator yaitu dengan rata-rata skor 2,34 atau 58,35%. Adapun indikator sebagai berikut yaitu:

1. Indikator peran pemerintah sebagai regulator

   Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggraan pembangunan dalam hal pemberdayaan

petani kakao (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib adaministrasi pembangunan). Indikator ini mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, peran pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao, meningkatkan produktifitas petani, mengatasi masalah petani kakao, dan meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao, dapat dikatakan peran pemerintah sebagai regulator yang ada di Kecamatan Sabbang sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari presentase responden yaitu dengan jumlah nilai 64,99%.

2. Indikator peran pemerintah sebagai dinamisator

   Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Indikator ini berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kafasitas pemberdayaan petani kakao, meningkatkan inovasi dan pemanfaat teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisifatif, dan sebagai agen mempercepat perubahan, dapat dikatakan peran pemerintah sebagai dinamisator yang ada di Kecamatan Sabbang, baik dengan jumlah presentas 62,83%.

3. Indikator peran pemerintah sebagai fasilitator

   Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan dearah). Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis, dapat dikatakan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator yang ada di Kecamatan Sabbang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari presentase dengan jumlah 52,69%.

4. Indikator peran pemerintah sebagai katalisator

   Peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bias menjadi model sosial untuk membangun partisipasi. Pada indikator ini merspon berbagai keluhan petani kakao, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus lebih ditingkatkan dan pemasaran hasil pertanian harus dipermudah agar petani kakao dapat menjual hasil pertaniannya. Peran pemerintah sebagai katalisator di Kecamatan Sabbang sudah dapat dikatakan cukup baik dengan jumlah presentase 52,89%.

Saran

Upaya mengoptimalkan peran pemerintah daerah, maka direkomendasikan saran sebagai berikut: 1. Pemerintah lebih banyak memberikan pelatihan kepada para petani, terutama dalam hal proses produksi dan pemasaran. 2. Pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas, terutama bantuan modal kepada kelompok tani agar produksi pertaniannya meningkat. 3. Pemerintah juga lebih memperhatikan bantuan pupuk kepada kelompok tani agar lebih tepat sasaran.

REFERENSI

Jusnaeni, Sri. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sektor Petanian*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers

Murtir Jeddawi. 2008. *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS.* Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Nurdin, Muhammad. 2014. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.